

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PUSAT KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
TAHUN 2013



Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyelenggarakan fungsinya dalam : (1) perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan; (2) perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan; (3) perumusan rencana dan pelaksanaan, pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; (4) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan; (5) penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan (6) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: *"menjadi institusi yang handal, inovatif dan aspiratif dalam menunjang terwujudnya kecukupan pangan"*. Untuk mencapai visi tersebut, disusun Misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: (1) meningkatkan pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; (2) meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; dan (3) menyiapkan konsep perumusan kebijakan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.

Tahun 2013 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sehingga walaupun visi dan misinya telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis; tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini masih mengacu pada program dan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, yang diukur dengan indikator kinerja: (a) jumlah desa yang diberdayakan dalam Demapan (regular dan kawasan) sebanyak 1.625 desa; (b) analisis penanganan daerah/lokasi

rawan pangan, SKPG sebanyak 455 lokasi; (c) jumlah hasil penyusunan FSVA nasional sebanyak 1 laporan; (d) jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan sebanyak 36 laporan; dan (e) penguatan kapasitas aparat dan masyarakat sebanyak 8 Laporan.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dicapai melalui Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mengembangkan kemampuan akses pangan secara sinergis dan partisipatif; dan (c) mencegah serta menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.438.060.000,-. Kemudian terjadi perubahan kebijakan pemanfaatan anggaran nasional untuk subsidi BBM, sehingga anggaran untuk kegiatan strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan menjadi Rp. 83.318.628.000,- atau dihemat 8,88 persen.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2013 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian untuk alokasi anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 4.407.310.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.994.746.174,- atau 90,64 persen. Kegiatan yang paling terbesar pada Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.860.824.199,-.

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 78.911.318.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 73.155.041.555,- atau 92,71 persen.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB	
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis	4
1. Visi	4
2. Misi	4
3. Tujuan Strategis	4
4. Sasaran Strategis	5
5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	5
6. Rencana Kinerja Tahun 2013	8
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013	9
III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Hasil Pengukuran Kinerja	11
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013	12
C. Capaian Kinerja Lainnya	40
D. Dukungan Instansi Lain	42
E. Akuntabilitas Keuangan	43
F. Hambatan dan Permasalahan	44

G. Upaya yang Dilakukan	45
IV Penutup	34
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
LAMPIRAN	48

Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon II Kementerian/Lembaga

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013

Tabel Lokasi dan Bansos Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2013

Tabel Indikator, Definisi, Perhitungan dan Sumber Data FSVA Nasional 2013

Tabel Kabupaten/kota yang masuk dalam prioritas 1 – 3 (akses pangan sangat rendah s/d akses pangan cukup rendah) berdasarkan indeks komposit/gabungan

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Rencana Kerja Tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013	9
2	Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun Anggaran 2013	10
3	Pengukuran Pencapaian Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013	11
4	Perkembangan Jumlah Lokasi Kegiatan Demapan Tahun 2009 – 2013	13
5	Pemanfaatan Bansos Desa Kawasan Mandiri Pangan	16
6	Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan	18
7	Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan	19
8	Indeks Komposit/Gabungan Akses Pangan	26
9	Data Produksi Aram I dan Stok Gabah di Penggilingan Indonesia	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Jumlah Kabupaten yang Masuk Dalam Kategori Prioritas 1 s/d prioritas 6 berdasarkan indeks komposit	28
2	Perkembangan Alokasi Bansos Desa Mandiri Pangan	19

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan selama menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar prestasi yang telah dicapai.

Melalui LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja Pusat ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2013. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja aparat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan



Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St
NIP 19580216 198103 1001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Tugas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu melaporkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemberi mandat dan publik) tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta tingkat capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 sebagai: (1) pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2013; (2) untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (3) bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di masa datang.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan pemantauan dan pemantapan ketersediaan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
- 2) Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan dan;
- 3) Pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan didukung oleh tiga bidang, yaitu:

- 1) **Bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan dan Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melakukan (a) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi serta analisis ketersediaan pangan; (b) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi sumberdaya pangan.
- 2) **Bidang Akses Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melakukan (a) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi analisis akses pangan; (b) penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pengembangan akses pangan.
- 3) **Bidang Kerawanan Pangan** terdiri dari Subbidang Analisis Kerawanan Pangan dan Subbidang Penanggulangan Kerawanan Pangan dengan tugas (a) melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi serta analisis kerawanan pangan, (b) melakukan penyiapan

bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Tahun Anggaran 2013 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui dukungan sumberdaya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan sarana/prasarana lainnya berupa biaya, data/informasi, alat pengolah data/komputer, dana khususnya dalam melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan perumusan kebijakan ketahanan pangan. Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik (penduduk, statistik pertanian, konsumsi/Susenas, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor, stok pangan, dan lain-lain) secara *series*, serta data primer dan sekunder dari instansi terkait yang ada di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Mengingat pada tahun 2013 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan, target dan sasaran, maka Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga melakukan revisi Renstra. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2013 telah disusun Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai berikut:

1. Visi

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan, maka Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2010-2014 ***“Responsif, aspiratif, inovatif, dan mampu memobilisasi sumberdaya dalam peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan”***.

2. Misi

Guna mencapai visi tersebut, disusun Misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- a. Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif melalui partisipasi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam upaya peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Membangun partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan ketersediaan, akses dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. Menyiapkan analisis yang akurat dan bahan rumusan kebijakan yang tepat tentang ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
- d. Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penanggulangan kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan.

3. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan strategis dari Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah :

- a. Melakukan pengkajian dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan; dan
- c. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya.

4. Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Tersedianya bahan kajian, rumusan, dan kebijakan ketersediaan, akses, dan penanganan rawan pangan;
- b. Tersedianya bahan pemantauan dan pemantapan ketersediaan, akses, dan penanganan kerawanan pangan;
- c. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasai.

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut , ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2010 – 2014, yaitu:

- 1) Memobilisasi dan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan (*expertise*) yang ada (birokrasi, masyarakat, dan pakar setempat);
- 2) Memobilisasi sumberdaya (alam, *financial*, sosial, dan teknologi), daerah dan masyarakat untuk pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;

- 3) Memanfaatkan bantuan teknis dari Negara-negara asing dan lembaga internasional untuk kepentingan pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan di Indonesia.

Implementasi dari strategi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2010–2014, dilaksanakan melalui :

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
- 2) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP);
- 3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*);
- 4) Pengembangan analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan;
- 5) Peningkatan kapasitas aparat;
- 6) Menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat.

b. Kebijakan

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;
- 2) Mengembangkan kemampuan akses pangan secara sinergis dan partisipatif; dan
- 3) Mencegah serta menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

c. Program

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2010–2014 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Pada tahun 2010 yang merupakan masa peralihan, pelaksanaan program masih mengacu pada Renstra Badan Ketahanan Pangan

Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut, sasaran program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah pengembangan model-model peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan, dan mengelola aset setempat (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat, dengan kegiatan utama sebagai berikut :

- 1) **Pengembangan Desa Mandiri Pangan**, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan. Selain itu dilakukan juga upaya penyediaan protein hewani di tingkat kelompok dan pengembangan ketahanan pangan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
- 2) **Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana rawan pangan kronis dan transien. Penanganan kerawanan pangan kronis dilakukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, investigasi dan intervensi. Sedangkan untuk penanganan kerawanan pangan transien dilakukan melalui investigasi dan intervensi.
- 3) **Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*)**. Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa.
- 4) **Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan**, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis,

secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan, antara lain melalui pemantauan ketersediaan pangan, sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, penyusunan NBM, penyusunan dan analisis sumberdaya pangan, monitoring dan analisis situasi akses pangan, pengembangan akses pangan, penyebarluasan informasi ketersediaan, kerawanan dan akses pangan.

5) Apresiasi Aparat Untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan, adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembangan akses pangan; bagi aparat di daerah dan pusat.

6. Rencana Kinerja Tahun 2013

Rencana kinerja pada tahun 2013 merupakan implementasi rencana jangka menengah yang dituangkan kedalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut :

a. Sasaran Kinerja Tahun 2013

Berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 yang masih mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2010-2014, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 yang hendak dicapai, yaitu meningkatnya kualitas pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Diberdayakannya Desa Mandiri Pangan sebanyak 1.625 desa;
- 2) Terlaksananya analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG di 455 lokasi;
- 3) Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA sebanyak 1 laporan;
- 4) Tersusunnya hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan sebanyak 36 laporan;

- 5) Tersusunnya laporan penguatan kapasitas aparat dan masyarakat sebanyak 8 laporan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 *)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan)	1.625 Desa
	2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG	455 lokasi
	3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Nasional	1 Laporan
	4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan	36 Laporan
	5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	8 Laporan

*) berdasarkan revisi pada bulan Juni 2013

B. PENETAPAN KINERJA

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sebagai berikut:

**Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun Anggaran 2013**

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan)	1.625 Desa
	2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG	455 lokasi
	3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Nasional	1 Laporan
	4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan	36 Laporan
	5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat	8 Laporan

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan : Rp . 83.318.628.000,00

Keterangan:

Penetapan kinerja ini berdasarkan hasil revisi yang dilakukan pada bulan Juni 2013, target jumlah desa yang diberdayakan dari 1.637 menjadi 1.625 desa, dan jumlah anggaran semula Rp.91.438.060.000,- menjadi Rp. 83.318.628.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang digunakan pada tahun 2013 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU dan PK, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Indikator kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (reguler dan kawasan)	1.625 Desa	1.625 Desa	100
	2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG (Lokasi)	455 lokasi	455 lokasi	100
	3. Jumlah hasil penyusunan FSVA Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
	4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan (Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	100

	5. Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat (Laporan)	8 Laporan	8 Laporan	100
--	--	-----------	-----------	-----

Sasaran strategis tahun 2013 yang ditargetkan telah tercapai 100 persen, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun-tahun sebelumnya.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Sasaran yang telah disusun dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra), IKU dan PK, namun demikian dapat berubah mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2013 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kemandirian Pangan

a. Desa Mandiri Pangan Reguler

Kegiatan Desa Mandiri Pangan reguler telah dilaksanakan sejak tahun 2006, dengan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat miskin di lokasi rawan pangan menjadi kaum mandiri, mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Sasaran pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2013 adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa rawan pangan pada 1.516 desa, 410 Kabupaten/Kota, 33 provinsi yang terdiri dari 359 desa exit strategy, 466 desa tahap kemandirian, 262 desa tahap pengembangan dan 429 desa tahap penumbuhan. Adapun perkembangan jumlah lokasi Kegiatan Demapan Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Lokasi Kegiatan Demapan Tahun 2009-2013

Uraian	Rencana			Realisasi		
	Propinsi	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan	Propinsi	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan
TA. 2009 • Reguler	33	74	349	33	74	359
TA. 2010 • Reguler	33	107	470	33	106	466
TA. 2011: • Reguler	33	18	262	33	18	262
TA. 2012: • Reguler	33	11	429	33	11	429
TA.2013	0	0	0	0	0	0
Total: • Reguler	33	210	1510	33	209	1516

Kegiatan Desa Mandiri Pangan telah berkembang, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Hasil capaian kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2013 yaitu :

- o Pada tahun 2013, sudah tidak dialokasikan kegiatan Desa Mandiri Pangan yang baru, sehingga tidak ada tahap persiapan dan tidak dialokasikan dana bansos untuk desa baru. Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan TA 2009 sd pelaksanaan TA 2012, dari pasca kemandirian (2009), tahap kemandirian (2010), tahap pengembangan (2011, tahap penumbuhan (2012). Desa Mandiri Pangan TA 2009, masih dialokasikan dana pembinaan dalam rangka penyapihan untuk mencapai kemandirian. Desa yang ditargetkan mencapai kemandirian, namun dalam perkembangannya masih memerlukan pembinaan lanjutan akan dibina oleh masing-masing daerah dengan dukungan dana APBD provinsi maupun Kabupaten.
- o Tahap Penumbuhan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha melalui peningkatan teknologi pengolahan penyimpanan dan pemasaran.
- o Tahap pengembangan merupakan tahap ketiga pelaksanaan Desa Mandiri Pangan. Pada tahap pengembangan telah berlangsung penguatan kelembagaan, dinamika usaha produktif kelompok, pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usaha tani dan sebagainya, selain

itu terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, peningkatan pangan rumah tangga, peningkatan pola pikir masyarakat

- o Tahap kemandirian merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Pada tahap kemandirian telah dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan layanan dan jaringan usaha, pengembangan sistem ketahanan pangan untuk pengembangan diversifikasi produksi, pengembangan akses pangan, pengembangan jaringan pemasaran dan penganeekaragaman konsumsi pangan, terjadinya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pedesaan
- o Jumlah Desa Mandiri Pangan yang telah diberdayakan sd tahun 2013 sebanyak 1.516 desa, masing-masing dialokasi anggaran sebesar total Rp. 15 juta di yang dipergunakan untuk pelatihan, penguatan kelompok, pertemuan tim pangan desa dan honor-honor untuk pendamping dan LKD.
- o Selain dana bansos, beberapa provinsi dan dan kabupaten mengalokasikan dana pendampingan yang berasal dari APBD. Selain bantuan berupa dana, kegiatan Desa Mandiri Pangan juga banyak mendapatkan dukungan kegiatan dari lintas sektor terkait, seperti dari: KemenPU, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, KemenKop & UKM, dll. Banyaknya dukungan lintas sektor tersebut tidak terlepas dari kontribusi dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Desa Mandiri Pangan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan.
- o Dalam rangka memperkenalkan program desa mandiri pangan kepada masyarakat luas, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah membuat pencetakan Baliho, Leaflet, Brosur Gerakan Kemandirian Pangan.

b. Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan direncanakan dilaksanakan di Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan selama 5 tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Dalam tiga tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan

lebih dominan. Berdasarkan disain ini diharapkan akan lebih terjamin keberlanjutan pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dengan pendekatan wilayah kecamatan, melalui (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor.

Identifikasi permasalahan dan potensi dilakukan dengan pendekatan ekologi untuk melihat potensi sumberdaya lokal, karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat adat, agar dapat dilakukan pendekatan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil pemetaan potensi wilayah kawasan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kapasitas individu, masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya. Pendampingan masyarakat juga diarahkan untuk penguatan forum komunikasi kawasan, lembaga keuangan, serta penguatan sistem ketahanan pangan kawasan. Penguatan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan, akses fisik, daya beli masyarakat, kualitas pangan, dan diversifikasi pangan. Outcomes Kawasan di 109 kawasan di 60 kabupaten/kota yang terdiri kawasan Papua Barat-Papua: di 36 kawasan 13 kabupaten/kota, kawasan perbatasan di 73 kawasan 36 kabupaten/kota, kawasan kepulauan di 24 kawasan, 12 kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2013 baru memasuki tahap persiapan. Pada tahun 2013 alokasi awal kegiatan kawasan mandiri pangan di 121 kawasan akan tetapi seiring dengan perjalanan kegiatan terjadi penghematan anggaran, dan kegiatan kawasan mendapatkan penghematan anggaran dengan penurunan lokasi kawasan menjadi 109 kawasan.

Proses pencairan dana bansos sesuai dengan pengelolaan Bansos dimana dana bansos yang sudah dicairkan ke rekening kelompok, kemudian diserahkan kepada Lembaga Keuangan (LK) untuk dilakukan pengelolaan pemanfaatan di tingkat kawasan. Dana bansos yang sudah diterima oleh LK kemudian dimanfaatkan oleh

kelompok sesuai dengan RUK yang diajukan oleh kelompok kepada LK, setelah diverifikasi oleh FKK dan pendamping. Dana bansos dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif di bidang *on farm* (pertanian, peternakan kecil, perikanan, hortikultura), *off farm* (aneka olahan pangan, ikan ternak, dan perkebunan) dan *non farm* (perdagangan, simpan pinjam, jasa, kerajinan rumah tangga, pemasaran dan usaha lain diluar pertanian). Pemanfaatan dana bansos pada tahap I diarahkan pada usaha budidaya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan kelompok. Pemanfaatan Bansos Kawasan Mandiri Pangan tahun 2013 mencapai 100 persen pencairannya.

Tabel 5. Pemanfaatan Bansos Desa Kawasan Mandiri Pangan

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Lokasi Kawasan	109 Kawasan	109 Kawasan	100
2	Bansos	Rp.21.800.000.000	Rp.21.800.000.000	100

Untuk mendukung kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, dilakukan kegiatan Apresiasi Gerakan Kemandirian Pangan yang bertujuan untuk mendorong petani untuk lebih mandiri dalam menjalankan usahanya baik di bidang pertanian maupun peternakan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lingkungan yang ada. Adapun output yang diharapkan adalah 50 orang petani yang memahami kemandirian pangan.

Pelaksanaan kegiatan Apresiasi Gerakan Kemandirian Pangan dilaksanakan di Salatiga, Jawa Tengah dengan peserta berjumlah 50 orang petani dari 14 kabupaten yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang (Banten); Garut, Karawang dan Indramayu (Jawa Barat); Kabupaten Klaten, Semarang, Magelang, Salatiga dan Brebes (Jawa Tengah); Kabupaten Bantul (DIY); Kabupaten Jombang, Banyuwangi, dan Jember (Jawa Timur). Materi yang disampaikan pada apresiasi tersebut sebagai berikut :

1. *Best Practices*, dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dari pelaku usaha baik dibidang pertanian maupun peternakan kepada para peserta, yang dikemas dalam materi : Upaya Mencapai Kemandirian Pada Usaha Pertanian dan Peternakan oleh Bapak Warsiah dan Bapak Ahmadi;

2. Pengenalan Mikroba : Definisi dan Jenis Mikroba Pada Lahan Pertanian dan Pemanfaatan Mikroba untuk Optimalisasi Produktivitas Lahan secara Berkelanjutan oleh Dr. Hery Budiarto dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
3. Perumusan dan Pemecahan Masalah dari peserta yang dipandu oleh narasumber Bapak Warsiah, Bapak Ahmadi, dan Bapak Adil Amrullah;
4. Pembekalan "Filosofi Kemandirian : Penyediaan Pangan yang Berdaulat, Mandiri serta Berkelanjutan" oleh Jend (Purn) Endriartono Sutarto.

2. Analisis Penanganan Daerah/Lokasi Rawan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kegiatan SKPG bertujuan untuk menganalisis situasi pangan dan gizi; meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Sasaran kegiatan SKPG terpetakannya situasi pangan dan gizi dan terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini di 455 lokasi, yang terdiri dari pusat, 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota.

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil SKPG ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya. Hal ini dipertegas juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

sebagai bagian dari LPPD. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada tahun 2015 sebesar 60 persen.

Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dilakukan setiap bulan (analisis bulanan) dan tahun (analisis tahunan). Berikut data, indikator, sumber data dan cara pengolahan dan analisis datanya :

A. Analisis Bulanan

Data yang digunakan dalam analisis bulanan, baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dikumpulkan dari laporan anggota Tim Pokja. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal yang berasal dari laporan Tim Pokja Propinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 6. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan

Kelompok	Indikator	Sumber Data
A. Ketersediaan Pangan	a. luas tanam b. luas panen c. luas puso d. Cadangan Pangan	Laporan Tim Pokja Propinsi BPS BKP/BULOG
B. Akses Terhadap Pangan	Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)	Laporan Tim Pokja Propinsi BPS
C. Pemanfaatan Pangan	a. Angka Balita Ditimbang (D) b. Angka Balita Naik Berat Badan (N) c. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) d. Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) e. Kasus gizi buruk yang ditemukan	Laporan Tim Pokja Propinsi/ Kementerian Kesehatan
D. Spesifik Lokal	Jumlah tindak kejahatan setempat, jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, perubahan cuaca, dll	Laporan Tim Pokja Propinsi
E. Data Pendukung	a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir	Kementerian Pertanian dan BPS

Data yang diperoleh dari Pokja diolah dan dianalisis sehingga dihasilkan wilayah/daerah yang terindikasi rawan, waspada, dan aman pangan. Hasil analisis SKPG bulanan ini bertujuan sebagai isyarat dini dalam penanganan daerah rawan pangan dan juga menjadi dasar untuk melakukan investigasi pada daerah yang terindikasi rawan pangan. Selanjutnya hasil investigasi tersebut menjadi rekomendasi untuk dilakukan intervensi terhadap masyarakat yang mengalami rawan pangan.

Analisis bulanan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan melalui Pokja SKPG, analisis yang berbentuk laporan tersebut disampaikan ke Pokja tingkat Propinsi dan tembusan ke Pusat. Dalam pelaksanaannya, laporan dari kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan dikarenakan ketersediaan data sehingga mempengaruhi penyusunan laporan bulanan propinsi.

B. Analisis Tahunan

Data yang digunakan dalam analisis tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) pemanfaatan pangan.

Tabel 7. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan

Kelompok	Indikator	Sumber Data
A. Ketersediaan Pangan	a. Produksi setara beras	Laporan Tim Pokja Propinsi/BPS
	b. Jumlah penduduk tengah tahunan	BPS
	c. Cadangan pangan pemerintah	BULOG/Badan Ketahanan Pangan
B. Akses Terhadap Pangan	a. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Laporan Tim Pokja Propinsi/BKKBN
	b. Harga	BPS
	c. IPM	BPS
	d. NTP	BPS
C. Pemanfaatan Pangan	a. Jumlah balita	Laporan Tim Pokja Propinsi/ Kementerian Kesehatan
	b. Balita gizi buruk	
	c. Balita gizi kurang	

Pengolahan data tahunan berdasarkan 3 aspek tersebut yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh wilayah/daerah yang terindikasi rawan, waspada, dan aman pangan.

Hasil analisis SKPG tahunan ini bertujuan sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah dan panjang dalam penanganan daerah rawan pangan.

Berdasarkan hasil analisis SKPG Tahunan yang disusun di tingkat Pusat pada Tahun 2013 diperoleh hasil situasi pangan dan gizi di Indonesia dari 33 provinsi terdapat 25 provinsi terindikasi rawan pangan, 5 provinsi terindikasi waspada pangan, dan 3 provinsi terindikasi aman pangan. Provinsi yang terindikasi rawan pangan tersebut yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Untuk provinsi yang terindikasi waspada pangan berada di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Timur. Sedangkan yang tahan pangan berada di Provinsi DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara.

Terkait dengan hampir meratanya wilayah di Indonesia yang terindikasi rawan pangan yaitu 25 provinsi yang mengalami rawan pangan, hal ini dikarenakan pada: (1) aspek ketersediaan pangan, ditunjukkan dengan persentase rasio antara ketersediaan pangan dengan konsumsi normative; (2) aspek akses pangan, ditunjukkan dengan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I; dan (3) aspek pemanfaatan pangan, ditunjukkan dengan persentase prevalensi gizi kurang pada balita.

Beberapa provinsi yang terindikasi rawan pangan, tidak disebabkan oleh ketiga aspek tersebut, namun hanya disebabkan satu atau 2 aspek yang pada akhirnya pada skor komposit menunjukkan kondisi rawan pangan. Berikut disampaikan penyebab indikasi rawan pangan di provinsi berdasarkan masing-masing aspek:

- a. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh 3 aspek: rasio antara ketersediaan dan konsumsi normative, persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, dan persentase gizi kurang pada balita hanya terdapat pada Provinsi Maluku dan Papua Barat;
- b. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh 2 aspek: Rasio antara ketersediaan dan konsumsi normative dan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terdapat di Provinsi Papua;

- c. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh 2 aspek: Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan persentase gizi kurang pada balita terdapat di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara;
- d. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh satu aspek: Rasio antara ketersediaan dan konsumsi normatif terdapat di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta;
- e. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh satu aspek: persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terdapat di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur;
- f. Kerawanan pangan yang disebabkan oleh satu aspek: persentase gizi kurang pada balita terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) FSVA Nasional

FSVA Nasional 2013 menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat. FSVA Nasional 2013 ini menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sampai dengan level kabupaten. Kegiatan penyusunan FSVA Nasional menghasilkan output berupa tersusunnya FSVA Nasional sebanyak 1 Buku atau terealisasi 100 persen.

Kegiatan penyusunan FSVA bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman petugas pelaksana tentang pentingnya informasi ketahanan dan kerentanan pangan, (2) Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana dalam penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) provinsi/kabupaten, (3) Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana dalam pemanfaatan data/indikator peta ketahanan dan kerawanan pangan untuk menyusun rencana program peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

FSVA Nasional 2013 mengacu pada tiga aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Masing-masing

aspek tersebut diwakili dengan indikator-indikator yang mengimplementasikan aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

FSVA Nasional 2013 terdiri dari 13 indikator, dimana indikator tersebut terbagi dalam 9 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 kerawanan pangan transien. Indikator kerawanan pangan kronis meliputi rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan produksi bersih (padi, jagung ubi kayu dan ubi jalar), persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, angka harapan hidup pada saat lahir, persentase balita gizi kurang, persentase perempuan buta huruf, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, persentase desa yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Sedangkan kerawanan pangan transien meliputi deforestasi, curah hujan, panjang musim kemarau dan bencana alam (alam, sosial, teknologi dan lingkungan) secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran..... Metodologi dalam analisis komposit FSVA Nasional 2013 adalah menganalisis 9 indikator kerawanan pangan kronis dengan menggunakan *Principal Component Analysis (PCA)*, *Cluster Analysis* dan *Discriminant Analysis*.

FSVA Nasional 2013 juga dapat menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu dimana wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, mengapa wilayah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan, dan berapa banyak orang yang terkena dampak (estimasi).

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan komposit, dari total 398 kabupaten di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Prioritas 1 sebanyak 14 kabupaten (4%), Prioritas 2 sebanyak 38 kabupaten (10%), Prioritas 3 sebanyak 61 kabupaten (15%), Prioritas 4 sebanyak 107 kabupaten (27%), Prioritas 5 sebanyak 85 kabupaten (21%) dan Prioritas 6 sebanyak 93 kabupaten (23%). Dari 14 kabupaten yang termasuk kategori Prioritas 1, semuanya berasal dari Provinsi Papua. Dari 38 kabupaten yang termasuk kategori Prioritas 2, terdapat 10 kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9 kabupaten dari Provinsi Papua, 7 kabupaten dari Provinsi Papua Barat, 5 kabupaten dari Provinsi Maluku, 4 kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara, 1 kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten dari Provinsi Riau dan 1 kabupaten dari Provinsi Maluku Utara.

Penyebab utama kerentanan pangan secara umum adalah: (1) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, (2) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), (3) tingginya angka perempuan buta huruf, (4) tingginya jumlah keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan dan (5) tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Penyebab terjadinya kerentanan terhadap rawan pangan yang termasuk kategori Prioritas 1 adalah: (1) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), (2) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, (3) tingginya angka perempuan buta huruf, (4) tingginya angka stunting pada balita dan (5) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum.

Penyebab terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan yang termasuk kategori Prioritas 2 adalah: (1) tingginya angka perempuan buta huruf, (2) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, (3) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum, (4) tingginya angka stunting pada balita dan (5) angka harapan hidup.

Penyebab terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan yang termasuk kategori Prioritas 3 adalah: (1) tingginya jumlah keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan, (2) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), (3) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, (4) tidak memadainya produksi pangan serealialia dan (5) tingginya angka stunting pada balita.

4. Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan

Kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan sebanyak 36 laporan terdiri dari :

a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah dilakukan

memperoleh data ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak.

Pada tahun 2013, telah disusun Buku NBM Indonesia 2011-2012 yang berisi data 2011 Angka Tetap, 2012 Angka Sementara dan 2013 Angka Perkiraan.

Hasil analisis NBM berdasarkan Angka Tetap 2011 dan Angka Sementara 2012 sebagai berikut :

- (1) Tingkat ketersediaan energi dan protein pada periode tahun 2011 – 2012 sudah melebihi anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.200 Kalori/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein 57 gram/kapita/hari. Tingkat ketersediaan energi di tahun 2011 sudah mencapai 165,73 persen dan protein 163,39 persen dari anjuran sedangkan di tahun 2012 sebesar 169,86 persen dan protein 165,16 persen.
- (2) Pangan nabati masih mendominasi ketersediaan energi setiap tahunnya. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 95,58 persen namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 95,32 persen. Pangan hewani memberikan kontribusi terhadap ketersediaan energi sebesar 4,42 persen pada tahun 2011 dan meningkat kontribusinya pada tahun 2012 menjadi 4,68 persen.
- (3) Kelompok pangan yang bersumber dari nabati juga memberikan kontribusi yang dominan pada ketersediaan protein. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 80,64 persen, sedangkan protein yang berasal dari pangan hewani 19,36 persen. Pada tahun 2012, proporsi protein dari nabati ini menurun menjadi 78,27 persen, dan proporsi pangan hewani meningkat menjadi 21,73 persen.
- (4) Kelompok padi-padian merupakan kelompok bahan makanan yang menyumbangkan energi terbesar terhadap total ketersediaan pangan. Pada tahun 2011 ketersediaan kalori per kapita per hari pada kelompok padi-padian sebesar 2.296 kkal dan tahun 2012 sebesar 2.295 kkal. Total ketersediaan energi kelompok padi-padian tahun 2012 menurun 1 kkal dibandingkan tahun 2011. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi komoditas gabah, jagung, dan tepung gandum, diikuti pula dengan peningkatan jumlah ekspor dan penurunan impor komoditas tersebut.

- (5) Kelompok makanan berpati total kontribusinya tahun 2011 sebesar 279 kkal (7,66 persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2012 sebesar 288 kkal/kapita/hari (7,70 persen dari total ketersediaan)
- (6) Kelompok gula kontribusi energinya pada tahun 2011 sebesar 111 kkal/kapita/hari (3,06 persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2012 menjadi 205 kkal/kapita/hari (5,49 persen dari total ketersediaan).
- (7) Kelompok buah dan biji berminyak total sumbangan energinya sebesar 249 kkal/kapita/hari (6,83 persen dari total ketersediaan) tahun 2011, menurun menjadi 236 kkal/kapita/hari (6,31 persen dari total ketersediaan) pada tahun 2012.
- (8) Kelompok buah-buahan mensuplai energi sebesar 70 kkal/kapita/hari (1,92 persen dari total ketersediaan) tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 70 kkal/kapita/hari (1,88 persen dari total ketersediaan).
- (9) Kelompok sayuran memberikan kontribusi energi sebesar 32 kkal/kapita/hari pada tahun 2011 (0,87 persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2012 sebesar 32 kkal/kapita/hari (0,86 persen dari total ketersediaan).
- (10) Kelompok daging memberikan kontribusi sebesar 50 kkal/kapita/hari (1,36 persen dari total ketersediaan) pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sebesar 50 kkal/kapita/hari (1,33 persen dari total ketersediaan).
- (11) Kelompok telur memberikan sumbangan zat gizi sebesar 20 kkal/kapita/hari (0,54 persen dari total ketersediaan) pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sebesar 21 kkal/kapita/hari (0,57 persen dari total ketersediaan).
- (12) Kelompok susu memberikan kontribusi sebesar 24 kkal/kapita/hari pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sebesar 25 kkal/kapita/hari.
- (13) Kelompok ikan memberikan kontribusi sebesar 64 kkal/kapita/hari (1,76 persen dari total ketersediaan) pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sebesar 76 kkal/kapita/hari (2,04 persen dari total ketersediaan).
- (14) Kelompok minyak dan lemak memberikan kontribusi sebesar 451 kkal/kapita/hari (99,23 persen dari minyak nabati dan 0,77 persen dari lemak hewani) pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 sebesar 440 kkal/kapita/hari (99,09 persen dari minyak nabati dan 0,91 persen dari lemak hewani).

b. Analisis Situasi Akses Pangan

Tujuan dari analisis situasi akses pangan adalah: a) Mengidentifikasi titik-titik akses pangan rendah berdasarkan indikator yang ditetapkan, b) Mengidentifikasi penyebab terjadinya akses pangan rendah di wilayah, c) Melakukan analisis situasi akses pangan. Adapun output yang diharapkan adalah tersedianya informasi situasi akses pangan untuk merencanakan upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Kegiatan ini hanya dilakukan di pusat.

Indikator yang digunakan untuk analisis situasi akses pangan adalah indikator tahunan terdiri dari 7 indikator dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator Fisik mencakup :
 - a. Ketersediaan pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar) :
 - Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dalam ton GKG, PK, dll).
 - b. Infrastruktur :
 - Persentase desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat;
 - Persentase desa yang tidak mempunyai pasar dan jarak terdekat ke pasar lebih dari (minimum) 3 km.
2. Indikator ekonomi dilihat dari daya beli pangan (ukuran kemampuan masyarakat rata-rata penduduk dalam membeli pangan). Indikator ekonomi meliputi :
 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
 - Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu;
 - Nilai *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)* ekonomi kerakyatan per kapita.
3. Indikator sosial mencakup :
 - Persentase penduduk yang tidak tamat sekolah dasar (SD).

Adapun hasil analisis situasi akses pangan yang dilakukan terhadap 33 provinsi adalah sebagai berikut :

Analisis komposit menjelaskan pada kita kondisi akses pangan suatu daerah disebabkan oleh kombinasi dari tiga dimensi akses pangan. Kemudian dengan melihat seluruh grafik individu maka dapat diidentifikasi penyebab utama kondisi akses pangan di suatu kabupaten. Harus disebutkan bahwa setiap daerah kondisi aksesnya berbeda dan penyebabnya juga bervariasi, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda.

Tabel 8. Indeks Komposit/Gabungan Akses Pangan

Komposit	Prioritas	Warna Pada grafik	Kabupaten	
			jumlah	%
≥ 0.8	1	merah tua	3	0.60
$0.64 - < 0.8$	2	merah	13	2.62
$0.48 - < 0.64$	3	merah muda	37	7.44
jumlah merah			53	10.66
^b $0.32 - < 0.48$	4	hijau muda	378	76.06
$0.16 - < 0.32$	5	hijau	60	12.07
< 0.16	6	hijau tua	6	1.21
jumlah hijau			444	89.34
tidak ada data			0	0
Total			497	100

Sumber : diolah oleh bidang Akses Pangan

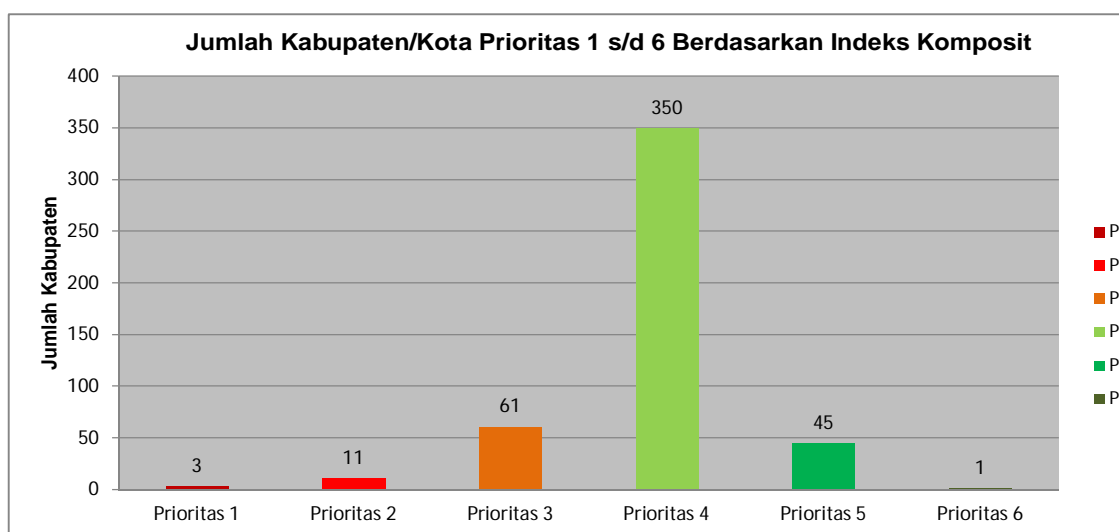
Hasil analisis komposit menggambarkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di 33 provinsi masuk dalam kelompok gradasi warna hijau yaitu sebanyak 444 kabupaten/kota dari total 497 kabupaten/kota, sedangkan yang masuk dalam gradasi warna merah hanya 53 kabupaten/kota. Kelompok gradasi merah menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapat prioritas khusus dalam hal penanganan masalah akses pangan. Kabupaten yang berada dalam kelompok warna merah tua (prioritas 1) tidak berarti bahwa semua penduduknya berada dalam kondisi akses pangan rendah. Demikian pula halnya dengan kabupaten pada kelompok warna hijau, tidak berarti bahwa semua penduduknya berada dalam kondisi akses pangan tinggi. Analisis ini hanya menggambarkan kecenderungan prevalensi akses pangan secara relatif. Dengan perkataan lain, daerah-daerah yang berwarna merah memiliki tingkat akses pangan yang lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang berwarna hijau dan membutuhkan perhatian segera.

Untuk wilayah pedesaan, khususnya di daerah terpencil dan wilayah kepulauan, secara fisik aksesibilitasnya masih bermasalah. Hambatan distribusi pangan karena sarana/prasarana infrastruktur jalan maupun pasar yang tidak memadai, menyebabkan kesulitan penduduk/rumah tangga untuk memperoleh pangan. Meski mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan adalah sebagai petani, namun tidak menjamin memiliki cadangan

pangan rumah tangga yang memadai. Hal ini karena produksi pangan yang dihasilkan habis dijual untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi sebagian besar merupakan petani penggarap/gurem. Semakin rendah kesejahteraan/daya beli petani maka semakin rendah aksesnya terhadap pangan.

Kabupaten yang akses pangannya sangat rendah atau termasuk kategori prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, (2) Persentase desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, (3) Rasio konsumsi normatif kapita per produksi dan (4) persentase penduduk yang tidak tamat SD.

Secara umum, kondisi saat ini menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap pangan khususnya pada daya beli pangan yang semakin rendah. Naiknya harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) dunia menyebabkan rendahnya aksesibilitas pangan masyarakat dan meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di pedesaan.



Gambar 1. Diagram jumlah kabupaten yang masuk dalam kategori prioritas 1 s/d prioritas 6 berdasarkan indeks komposit

Rendahnya akses pangan berdampak pada status gizi dan kondisi kesehatan penduduk. Kekurangan akses pangan pada balita menyebabkan kasus gizi buruk/kurang yang berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun mental serta tingkat kecerdasan; kekurangan asupan gizi pada orang dewasa mengakibatkan penurunan produktivitas; dan pada wanita hamil

mempengaruhi kondisi janin dalam kandungannya serta menyebabkan resiko kematian pada saat melahirkan. Dan pada akhirnya, rendahnya status gizi penduduk menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas penduduk serta menyebabkan terjadinya lost generation.

Beberapa gangguan yang menghambat akses pangan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor eksternal. Sumber mata pencaharian dan aset dasar terganggu oleh adanya goncangan dan gangguan musiman—di mana para korban tak berdaya atau terbatas sekali kemampuannya.

c. Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan

Tujuan dari kegiatan monitoring akses pangan adalah mengetahui stok gabah dan beras yang tersedia di penggilingan pada setiap bulan. Adapun output yang diharapkan adalah tersedianya data stok gabah dan beras di penggilingan setiap akhir bulan.

Berikut ini daftar jumlah penggilingan padi di seluruh provinsi di Indonesia, berdasarkan kapasitas dan lokasi usahanya :

No	Provinsi	Penggilingan Kecil			Penggilingan Sedang			Penggilingan Besar			Tanpa	Total
		Tetap	Keliling	Total	Tetap	Keliling	Total	Tetap	Keliling	Total	Keterangan	
1	Jawa Timur	15.067	10.180	25.247	1.409	255	1.664	359	57	416	280	27.607
2	Jawa Barat	30.601	130	30.731	1.996	6	2.002	546	62	608	213	33.554
3	Jawa Tengah	18.463	5.097	23.560	833	25	858	132	9	141	222	24.781
4	Sulawesi Selatan	14.650	805	15.455	839	31	870	140	9	149	867	17.341
5	Kalimantan Barat	10.225	11	10.236	296		296	57	1	58	43	10.633
6	Sumatera Selatan	8.048	296	8.344	400	8	408	91	7	98	237	9.087
7	Banten	7.011	38	7.049	247	1	248	19		19	172	7.488
8	Lampung	6.612	328	6.940	269	9	278	16		16	192	7.426
9	Sumatera Utara	4.937	536	5.473	246	12	258	91	14	105	212	6.048
10	Sumatera Barat	4.464	93	4.557	280	1	281	43	3	46	117	5.001
11	NTT	3.787	73	3.860	136	2	138	44		44	388	4.430
12	NAD	2.315	612	2.927	202	12	214	84	4	88	4	3.233
13	NTB	2.173	652	2.825	191	9	200	106	7	113		3.138
14	Kalimantan Selatan	2.062	6	2.068	170		170	48		48	98	2.384
15	DI Yogyakarta	1.052	1.034	2.086	101	11	112	10	4	14	82	2.294
16	Kalimantan Tengah	2.077	16	2.093	84		84	19		19	41	2.237
17	Sulawesi Tengah	2.010	17	2.027	34	1	35			-		2.062
18	Kalimantan Timur	1.720	56	1.776	110		110	37	2	39	68	1.993
19	Jambi	1.479	8	1.487	37	1	38	29		29	257	1.811
20	Bali	1.518	47	1.565	120		120	32		32	22	1.739
21	Sulawesi Barat	1.285	83	1.368	29	2	31	14		14	22	1.435
22	Sulawesi Tenggara	1.262	46	1.308	100	3	103	1		1		1.412
23	Bengkulu	1.303	7	1.310	52	1	53	18		18	6	1.387
24	Riau	1.256	20	1.276	32	1	33	2		2	4	1.315
25	Sulawesi Utara	954		954								954
26	Gorontalo	658	10	668	1		1					669
27	Papua	177	17	194	3	-	3	-	-	-		197
28	Maluku	99	56	155	-	-	-	-	-	-	34	189
29	Bangka Belitung	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	124
30	Maluku Utara	73	21	94	8	-	8	-	-	-	2	104
31	Papua Barat	47	13	60	3	1	4	-	-	-	5	69
32	Kepulauan Riau	12	-	12	-	-	-	-	-	-	6	18
33	DKI Jakarta	11	-	11	4	-	4	-	-	-	-	15
TOTAL		147.532	20.308	167.840	8.232	392	8.624	1.938	179	2.117	3.594	182.175

Adapun rincian jumlah sampel per provinsi sebagai berikut :

NO.	PROVINSI	JUMLAH SAMPEL			TOTAL
		Besar	Sedang	Kecil	
1	BALI	13	5	2	20
2	BANTEN	12	24	4	40
3	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6	3	1	10
4	JAWA BARAT	96	48	16	160
5	JAMBI	11	5	4	20
6	JAWA TENGAH	70	56	14	140
7	JAWA TIMUR	72	36	12	120
8	KALIMANTAN BARAT	35	29	6	70
9	KALIMANTAN SELATAN	17	9	4	30
10	KALIMANTAN TENGAH	11	7	2	20
11	KALIMANTAN TIMUR	12	6	2	20

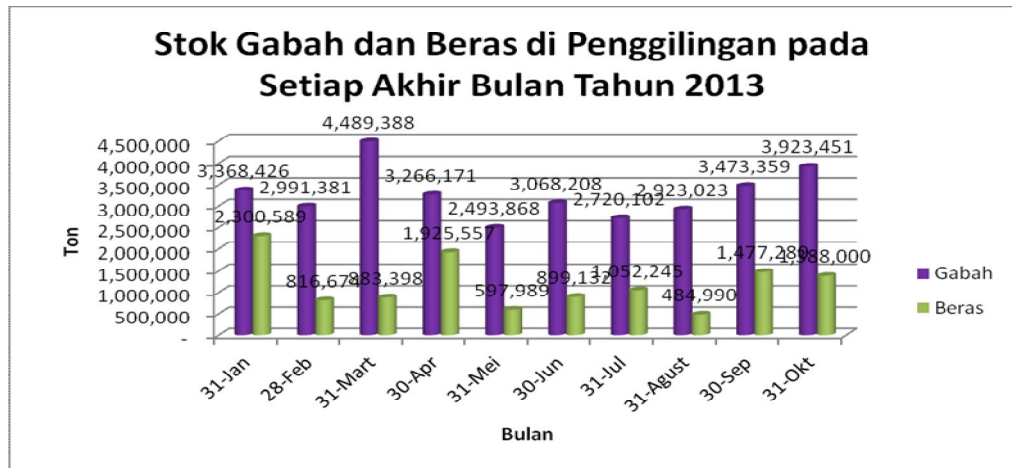
12	LAMPUNG	12	24	4	40
13	NANGROE ACEH DARUSSALAM	18	9	3	30
14	NUSA TENGGARA BARAT	24	12	4	40
15	NUSA TENGGARA TIMUR	8	10	2	20
16	RIAU	1	8	1	10
17	SULAWESI BARAT	11	7	2	20
18	SULAWESI SELATAN	50	31	9	90
19	SULAWESI TENGGARA	1	8	1	10
20	SUMATERA BARAT	15	12	3	30
21	SUMATERA SELATAN	22	14	4	40
22	SUMATERA UTARA	12	6	2	20
JUMLAH		529	369	102	1000

Hasil analisis monitoring akses pangan di tingkat penggilingan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Pada Setiap Akhir Bulan Tahun 2013

Stok gabah dan beras di penggilingan di peroleh dari data primer, yang merupakan hasil survey melalui telepon setiap akhir bulan di 1.000 penggilingan yang tersebar di 22 provinsi. Stok gabah dan beras di penggilingan di Indonesia setiap akhir bulan, merupakan penjumlahan stok gabah dan beras yang ada di penggilingan dari provinsi responden setiap akhir bulan. Berdasarkan survey diperoleh data rata-rata stok gabah yang ada di penggilingan setiap akhir bulan di Indonesia sebesar 3.271.738 ton/bulan, sedangkan rata-rata stok beras sebesar 1.182.585 ton/bulan.

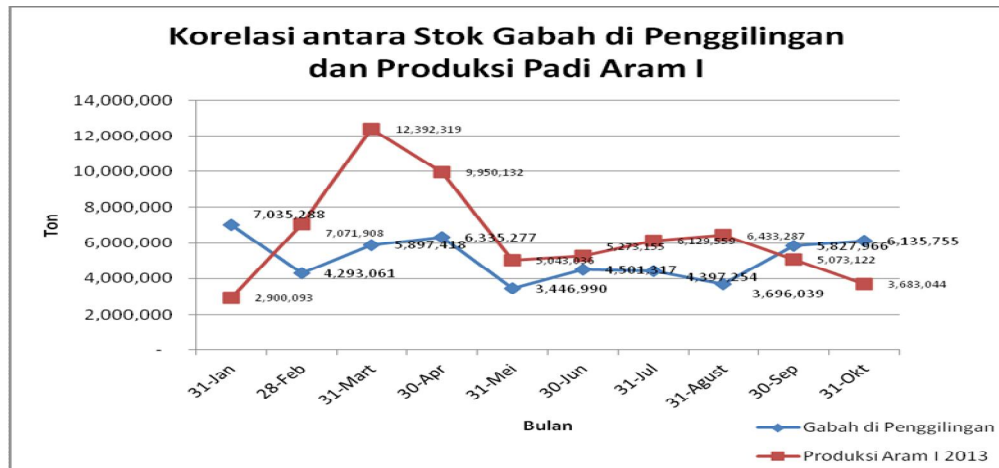
Stok gabah tertinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 4.489.388 ton, dan stok terendah terjadi pada bulan Mei 2013 yaitu sebesar 2.493.868 ton. Sedangkan stok beras terbanyak terdapat pada bulan Januari yaitu sebesar 2.300.589 ton, dan stok terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 484.990 ton. Stok beras di penggilingan jumlahnya cenderung lebih rendah daripada stok gabah, dikarenakan sebagian besar penggilingan langsung menjual berasnya setelah digiling tanpa disimpan terlebih dahulu di gudang. Berikut data stok gabah dan beras di penggilingan pada setiap akhir bulan tahun 2013 :



Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 248.820.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu maka rata-rata kebutuhan beras per bulan di Indonesia sebesar 2.357.984,2 ton. Jika rata-rata stok gabah per bulan di penggilingan dikonversi ke beras, dan dijumlahkan dengan stok beras yang ada di penggilingan, maka rata-rata stok beras yang ada di penggilingan setiap bulan adalah sebesar 3.235.274 ton atau setara dengan 1,4 kali kebutuhan beras nasional.

2. Korelasi Antara Stok Gabah Di Penggilingan Dan Produksi Padi Aram I Tahun 2013

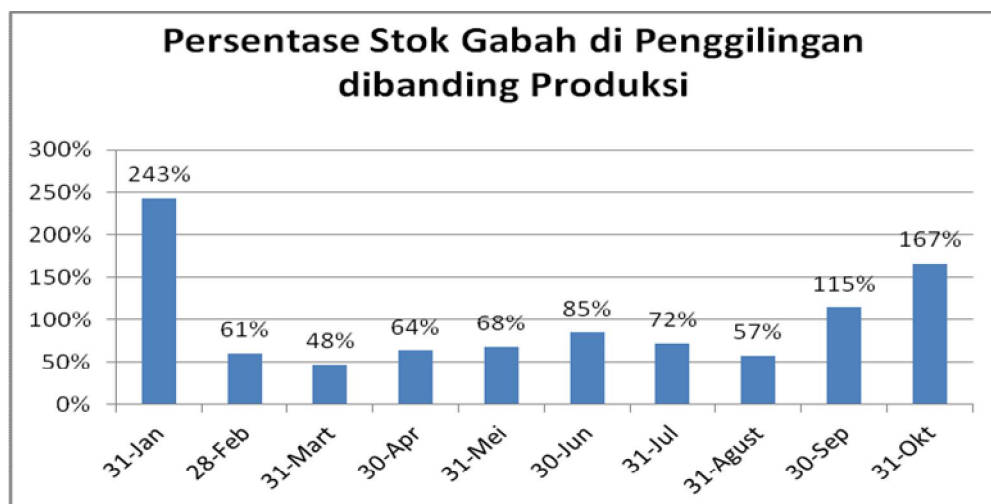
Besarnya stok gabah dan beras di penggilingan secara umum, dipengaruhi oleh produksi padi dan harga jual beras. Pada musim panen umumnya penggilingan menyimpan gabah dalam dua bentuk (1) gabah sebagai bahan baku untuk produksi hari berikutnya yaitu dalam bentuk gabah kering siap giling, dan (2) gabah kering panen yang masih harus dijemur. Berdasarkan hal tersebut, jumlah gabah yang disimpan diperkirakan sebanyak dua kali kapasitas produksinya. Pada saat menghadapi musim paceklik penggilingan akan menyimpan gabah sesuai dengan kemampuannya, yang dapat diperoleh dari daerah sekitar, dan apabila dari daerah sekitar tidak mencukupi akan mencari dari luar wilayah. Hal tersebut menjelaskan mengapa hasil survey kegiatan monitoring akses pangan di penggilingan ini, tidak ditemukan adanya hubungan antara produksi padi di satu wilayah dengan stok gabah yang ada di penggilingan. Berdasarkan hasil uji statistik, nilai korelasi antara stok gabah di penggilingan dengan data produksi padi aram I hanya sebesar 0,04.



Tidak adanya korelasi antara produksi dan besarnya stok di penggilingan, diduga disebabkan karena umumnya para pengusaha hanya menyimpan gabah yang akan digiling keesokan harinya, dan langsung menjual beras yang telah selesai digiling pada hari itu. Selain itu, biasanya para pengusaha penggilingan akan membeli gabah dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan produksinya apabila di daerah sekitarnya tidak panen, sehingga faktor produksi di suatu wilayah tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya produksi penggilingan.

3. Persentase Stok Gabah Di Penggilingan Dibanding Produksi

Tidak adanya korelasi antara produksi di suatu wilayah dan stok gabah yang ada di penggilingan pada wilayah yang sama, juga dapat dilihat dari besarnya presentase stok gabah di penggilingan dibandingkan dengan besarnya produksi. Gambar di bawah ini memperlihatkan pada bulan Januari, September, dan Oktober 2013 presentase stok gabah di penggilingan dibanding besarnya produksi mencapai lebih dari 100%, hal ini diduga karena para pengusaha biasanya telah menyimpan cadangan gabah untuk musim paceklik, sehingga pada saat produksi padi rendah mereka tetap bisa menjalankan usahanya.



Rata-rata presentase stok gabah di penggilingan setiap bulan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan angka produksi Aram I Tahun 2013 adalah sebesar 98%. Berikut tabel produksi dan stok gabah yang ada di penggilingan di Indonesia dari bulan Januari hingga Oktober 2013.

Tabel 9. Data produksi Aram I dan stok gabah di penggilingan Indonesia

Bulan	Produksi	Stok Gabah di Penggilingan
Januari	2.900.092,52	7.035.287,74
Februari	7.071.908,24	4.293.061,20
Maret	12.392.318,65	5.897.418,05
April	9.950.131,58	6.335.276,80
Mei	5.043.035,97	3.446.989,98
Juni	5.273.154,95	4.501.316,87
Juli	6.129.558,53	4.397.253,65
Agustus	6.433.286,55	3.696.038,67
September	5.073.122,09	5.827.966,15
Oktober	3.683.044,31	6.135.755,41

5. Penguatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat

a. Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan

Kegiatan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sasaran dari kegiatan ini

adalah meningkatnya kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya apresiasi analisis ketersediaan pangan terhadap aparat dari 33 provinsi atau terealisasi 100 persen.

Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Tahun 2013 dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu: (1) Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 – 7 Maret 2013 yang diikuti oleh 41 orang peserta dari 17 provinsi; (2) Tangerang, Banten, pada tanggal 25 – 27 Maret 2013 yang diikuti oleh 32 orang dari 16 provinsi. Materi yang disampaikan dalam Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan Harapan (AKG & PPH), Pola Panen Bulanan, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Adapun hasil pertemuan sebagai berikut :

- a) Penggunaan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) untuk perhitungan ketersediaan bahan makanan dalam bentuk zat gizi perlu disesuaikan dengan tabel yang baru, dimana pada tahun 2009 dipublikasikan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) oleh Persagi sebagai revisi dan penyempurnaan DKBM 2005.
- b) Terdapat perubahan rekomendasi tingkat ketersediaan energi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang sebelumnya 2.200 kkal/kap/hari menjadi 2.400 kkal/kap/hari dan tingkat ketersediaan protein yang semula 57 gram/kap/hari menjadi 63 gram/kap/hari.
- c) Koefisien dalam Analisis Prognosa Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) mengalami perubahan berdasarkan hasil kesepakatan BKP Pusat dan Tim Prognosa HBKN Nasional. Untuk puasa dan Idul Fitri koefisiennya menjadi 0,1 sedangkan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru menjadi 0,05. Hari besar keagamaan di tingkat wilayah yang belum masuk didalam perhitungan HBKN secara nasional dapat dimasukkan kedalam perhitungan HBKN dengan menggunakan angka koefisien peningkatan permintaan dan selang hari hasil kajian wilayah dengan memperhitungkan kondisi wilayah setempat.

- d) Jika data produksi tidak tersedia, maka angka produksi dalam NBM dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan angka konsumsi ditambah dengan 10–15 persen (asumsi angka ketersediaan lebih tinggi 10–15 persen dari angka konsumsi).
- e) Jika data keluar-masuk (ekspor-impor) bahan makanan antar wilayah tidak tersedia, maka data tersebut dalam NBM dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan angka konsumsi ditambah 10-15 persen, dengan catatan angka keluar-masuk yang dihasilkan harus disepakati bersama oleh tim NBM.
- f) Data konsumsi tingkat rumah tangga yang bersumber dari BPS diolah oleh BKP hanya sampai di tingkat provinsi. Oleh karena itu, data konsumsi tingkat rumah tangga di tingkat kabupaten dapat menggunakan data survei konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan oleh instansi terkait/berwenang.
- g) Di sebagian provinsi, buku NBM belum dipublikasikan dan belum digunakan sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan. Perlu adanya diseminasi Buku NBM provinsi pada instansi terkait (tim NBM provinsi), sehingga NBM provinsi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan.
- h) SK Tim NBM provinsi sebaiknya ditandatangani oleh Gubernur sebagai Kepala DKP Provinsi dengan Kepala BKP sebagai sekretaris. Sedangkan anggota tim pelaksana adalah pejabat yang menangani data NBM di instansi-instansi terkait.

b. Peningkatan Kapasitas LKD Demapan

Peningkatan kapasitas LKD Demapan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Lembaga Keuangan Desa (LKD) Desa Mandiri Pangan (Demapan) yang telah mencapai tahap kemandirian pangan. Adapun output yang diharapkan adalah tersosialisasinya kelembagaan LKD Demapan yang memiliki peran dan kinerja yang baik.

Kegiatan peningkatan kapasitas LKD Demapan berupa pertemuan dalam upaya peningkatan pemahaman peran dan kinerja LKD Demapan, dan sosialisasi pembentukan koperasi atau asosiasi di tingkat provinsi. Kegiatan peningkatan kapasitas LKD Demapan dimulai dari pemahaman terhadap peran dan kinerja LKD

Demapan yang telah mencapai kemandirian pangan, sampai tatacara membangun koperasi atau asosiasi LKD Demapan di tingkat provinsi, yang beranggotakan LKD Demapan yang sudah mencapai tahap kemandirian di 4 (empat) wilayah terpilih.

(1) Provinsi Jawa Barat dan Banten

Pertemuan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan dilaksanakan pada tanggal 28–30 Mei 2013 di Sumedang Jawa Barat, dengan dihadiri Ketua LKD Demapan dari Desa Mandiri Pangan yang sudah mencapai tahap kemandirian pada kabupaten yang mendapat alokasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jawa Barat dan Banten yang ada di Kabupaten Purwakarta, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Cirebon, Bandung, Pandeglang, Serang, Tangerang, Banten dan Cilegon.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan sebagai berikut: (a) Kebijakan peningkatan akses melalui gerakan kemandirian pangan oleh Kepala Bidang Akses Pangan; (b) Perspektif UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Barat; (c) Pengalaman BMT Barrah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Mikro oleh Ketua KJKS BMT Barrah Provinsi Jawa Barat; (d) Pengembangan Sebuah Organisasi oleh Ketua Indonesian Chef Assosiation (ICA) BPD Jawa Barat; (e) Lembaga Linkage Non BPR-Koperasi oleh Perbankan (Pemimpin Divisi Mikro Bank BJB).

(2) Provinsi Jawa Tengah dan DIY

Pertemuan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan dilaksanakan pada tanggal 11–13 Juni 2013 di Semarang, Jawa Tengah dengan peserta Ketua LKD Demapan dari Desa Mandiri Pangan yang sudah mencapai tahap kemandirian, pada kabupaten yang mendapat alokasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ada di Kabupaten Batang, Brebes, Banyumas, Magelang, Wonosobo, Klaten, Sragen, Semarang, Kendal, Pekalongan, Wonogiri, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Karanganyar, Boyolali, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan sebagai berikut: (a) Kebijakan peningkatan akses melalui gerakan kemandirian pangan oleh Kepala Bidang Akses Pangan; (b) Prosedur membentuk koperasi

(Koperasi Primer dan Sekunder) oleh Dinas Koperasi Propinsi Jawa Tengah; (c) Pengalaman Koperasi Sekunder dalam meningkatkan peran dan kinerja koperasi primer di tingkat kabupaten oleh PUSKUD Provinsi Jawa Tengah; (d) Upaya meningkatkan peran dan kinerja anggota asosiasi oleh Asosiasi AI Barokah; (e) Fasilitas permodalan bagi UMKM-K di Bank Jateng oleh Bank Jateng.

(3) Provinsi Jawa Timur

Pertemuan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2013 di Surabaya, Jawa Timur dengan peserta Ketua LKD Demapan dari Desa Mandiri Pangan yang sudah mencapai tahap kemandirian, pada kabupaten yang mendapat alokasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jawa Timur, yang ada di Kabupaten Pamekasan, Bondowoso, Pacitan, Bojonegoro, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Malang, Pasuruan, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, dan Lamongan.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan sebagai berikut: (a) Kebijakan peningkatan akses melalui gerakan kemandirian pangan oleh Kepala Bidang Akses Pangan; (b) Sosialisasi pendirian koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur; (c) Peranan PUSKUD Jatim dalam memotivasi kebangkitan KUD oleh PUSKUD Propinsi Jawa Timur; (d) Peranan Lembaga Keuangan Desa dalam Ketahanan Pangan oleh Asosiasi Lumbung Pangan Sumber Hikmah; (e) Ketentuan kredit linkage program dengan kelompok usaha dan kredit ketahanan pangan dan energy (KKP-E) oleh Bank Jatim.

(4) Provinsi Lampung

Pertemuan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan dilaksanakan pada tanggal 22-24 Nopember 2013 di Bandar Lampung dengan peserta Ketua LKD Demapan dari Desa Mandiri Pangan yang sudah mencapai tahap kemandirian, pada kabupaten yang mendapat alokasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Lampung, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tanggamus, Ping Sewu, Way Kanan, Lampung Barat dan Lampung Timur serta petugas/aparat kabupaten pelaksana Demapan di Provinsi Lampung.

Materi yang disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas LKD Demapan sebagai berikut: (a) Kebijakan peningkatan akses melalui gerakan kemandirian

No.17 Tahun 2012 oleh Disperindagkop Propinsi Lampung; (c) Pengalaman Koperasi Sekunder dalam meningkatkan peran dan kinerja koperasi primer di tingkat kabupaten oleh PUSKOPDIT Propinsi Lampung; (d) Pengalaman pembentukan asosiasi dan upaya meningkatkan peran dan kinerja anggotanya oleh KADIN Propinsi Lampung; (e) Linkage program sebagai sinergi BU, BPR dan UMKM oleh BI Propinsi Lampung.

c. Apresiasi SKPG

Pertemuan ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat dalam menganalisis situasi pangan dan gizi di wilayahnya melalui SKPG. Pertemuan ini dilaksanakan dua tahapan: (a) pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG I dilaksanakan pada tanggal 19-21 Maret 2013, di Cisarua, Bogor dengan dihadiri 60 orang peserta dari 16 (enam belas) propinsi, kabupaten/kota; dan (b) pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1-3 April 2013 dan dihadiri 60 orang peserta dari 15 (lima belas) propinsi, kabupaten/kota. Hal-hal prinsip yang ditegaskan kembali agar peserta makin memahami SKPG, yaitu :

- (a) Penjelasan terkait dengan indikator yang digunakan dalam analisis SKPG (sesuai dengan Permentan Nomor 43/2010), baik dalam hal ketersediaan data, cara pengisian data, analisis, visualisasi data maupun diseminasi dan penyebaran informasi
- (b) Setiap wilayah diharapkan segera membentuk Tim Pokja SKPG dengan melibatkan instansi yang terkait untuk memudahkan memperoleh data dan analisis SKPG, serta mengoptimalkan kinerja Tim Pokja sehingga analisis SKPG yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan;
- (c) Dalam pertemuan Tim Pokja SKPG dapat disepakati beberapa hal yang terkait dengan spesifik lokal tetapi perlu dipertimbangkan ketersediaan data agar analisis tetap dapat dilakukan.
- (d) Analisis SKPG diharapkan dilakukan rutin setiap bulan dan diringkas menjadi laporan situasi pangan dan gizi wilayah yang disampaikan secara rutin kepada pimpinan.

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penghargaan Desa Mandiri Pangan

Pada tahun 2012, Program Desa Mandiri Pangan mendapatkan penghargaan dari Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) Award, atas peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan serta mendapatkan hadiah sebesar \$ 100.000. Dana tersebut rencananya diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di 2 (dua) provinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana hibah tersebut akan direalisasikan pada tahun 2014.

Keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dalam menurunkan penduduk miskin mendorong Perwakilan *Food and Agriculture Organization* (FAO) Jakarta (dengan didukung oleh *World Food Programme* (WFP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat *Farmer Initiatives for Ecological Literacy and Democracy* - FIELD) mengusulkan kepada *Arab Gulf Programme for Development* (AGFUND) untuk mendapatkan AGFUND award, dengan pertimbangan bahwa : a) program ini memiliki pendekatan dan target penerima yang unik, yaitu keluarga miskin dan rawan pangan dengan pendekatan pemberdayaan, dan b) dilaksanakan secara sistematis selama empat tahun melalui empat tahapan, yaitu Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian, dimana setiap desa memperoleh intervensi pemerintah dalam tiga jenis, melalui pelatihan, penyediaan fasilitator, dan penyediaan dana Bansos (*seed capital*) sebesar Rp. 100 juta per desa.

Program Desa Mandiri Pangan (*Village Food Resilience Programme*) yang dikelola Badan Ketahanan Pangan memperoleh penghargaan untuk kategori 3, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam pengembangan ide-ide inovatif dan adopsi program perintis, kebijakan dan operasionalisasi/pengalaman yang baik (*policies and good practices*) untuk mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat miskin, dan berhak atas hadiah berupa hibah sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu US Dollar).

Dana hibah yang diperoleh dari AGFUND akan digunakan sebagai *pilot project* untuk membantu pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahap berikutnya, yaitu memperkuat dan memperluas basis ekonomi produktif yang sudah ada (pertanian) melalui penguatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Desa Mandiri Pangan yang pernah mendapatkan penghargaan ketahanan pangan, yaitu Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul provinsi D.I Yogyakarta dan Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

2. PPFS-APEC

Tahun 2013, Indonesia ditunjuk sebagai ketua PPFS dan Rusia sebagai wakilnya. Indonesia ditunjuk sebagai ketua berdasarkan kesepakatan anggota-anggota PPFS bahwa yang menjadi ketua PPFS tahun yang bersangkutan adalah wakil dari negara tuan rumah APEC sedangkan wakil ketua berasal dari ketua tahun sebelumnya.

Tema yang diangkat pada PPFS 2013 adalah "Penyelarasan Peran Petani dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Global" atau "***Aligning Farmers into the Achievement of Global Food Security***" yang mengacu pada tiga isu utama yaitu :
a) *Improving Farmers' Bargaining Power and Involvement along the Food Supply Chain*;
b) *Provision of Flexible and Affordable Technology for Farmers*; dan c) *New Fundamentals of Partnership*. Pemilihan tema tersebut didasari masih terbatasnya kesadaran keterlibatan petani khususnya dalam pencapaian ketahanan pangan di berbagai forum APEC, untuk itu Indonesia bermaksud memberikan kesempatan/ruang bagi petani dalam mengemukakan aspirasinya.

Dalam keketuaan Indonesia dalam PPFS 2013, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu : (1) Disepakatinya *Operating guideline* untuk *Management Council (MC)* dan *Working Group (WG)* serta *Action Plan 2012-2013* serta (2) *Concept on aligning farmers into achievement of global food security*, yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai *Leaders' Statement* pada KTT APEC bulan Oktober 2013 di Bali.

Beberapa hal penting terkait progress dan capaian PPFS 2013, sebagai berikut:

- a. *APEC Road Map* Ketahanan Pangan menuju 2020 (versi 2013) telah difinalkan dan disepakati oleh PPFS;
- b. *Operational Business Plan* disepakati untuk diformulasikan secara bersama-sama, agar mengoptimalkan partisipasi peran swasta;
- c. PPFS-US bertanggung jawab untuk menyusun *TOR (Term of Reference)* yang menjabarkan mekanisme untuk menghasilkan *Business Plan*;
- d. Disepakatinya dokumen final *Inputs to the Leaders' Statement* pada pertemuan *2nd MC PPFS Meeting* di Kyoto, July 11, 2013.

Selain capaian diatas, PPFS 2013 juga memberikan rekomendasi kepada pejabat tinggi China sebagai *incoming Chair PPFS 2014*. Yang terdiri atas enam poin penting sebagai berikut:

- a. Mendesain "*Private Business Meeting Only*" dengan representatif dari pemerintahan sebagai observer. Hal ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menggerakkan partisipasi peran swasta di PPFS;
- b. Mengintensifkan upaya komunikasi antara Management Council (MC) PPFS and ABAC untuk menyelaraskan penyelenggaraan pertemuan PPFS dengan ABAC, dengan menyesuaikan topik, agenda, *venues* dan tempat pelaksanaan rapat (agar difasilitasi oleh anggota MC-PPFS yang berasal dari ABAC);
- c. Untuk melakukan revisi, jika diperlukan, TOR PPFS untuk semakin menarik perhatian dan mengakomodasikan minat pihak bisnis/swasta;
- d. Membuka peluang untuk dilakukan review terhadap Road Map, jika diperlukan, menjadi versi 2014;
- e. Merealisasikan dan membuat rencana konkrit untuk menyelaraskan peran petani di dalam rantai suplai dan rantai nilai;
- f. Menyenggarakan pertemuan dua tahunan *Ministerial Meeting on Food Security* (2010 in Niigata Japan, 2012 in Kazan Russia).

Secara keseluruhan, CSOM mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam PPFS dan *meng-endorse APEC Food Security Road map towards 2020*.

D. Dukungan Instansi Lain

Pada tahun 2013 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari beberapa instansi terkait antara lain :

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan *World Food Programme (WFP)*.

Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

E. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 91.438.060.000,-. Kemudian terjadi perubahan kebijakan pemanfaatan anggaran nasional untuk subsidi BBM, sehingga anggaran untuk kegiatan strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan menjadi Rp. 83.318.628.000,- atau dihemat 8,88 persen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Alokasi Rp.	%	Realisasi Rp.	%
1	Pusat	4.407.310.000	5,29	3.994.746.174	90,64
2	Daerah	78.911.318.000	94,71	73.155.041.555	92,71
	- Provinsi (DK)	55.076.268.000	69,80	50.687.564.080	92,03
	- Kabupaten/Kota (TP)	23.835.050.000	30,21	22.467.477.475	94,26
	Total	83.318.628.000	100,00	77.149.787.729	92,60

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2013 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian untuk alokasi anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 4.407.310.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.994.746.174 atau 90,64 persen dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian	Alokasi Rp.	%	Realisasi Rp.	%
1	Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG	397.000.000	9,01	370.770.850	93,39
2	Laporan Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	300.000.000	6,81	290.614.450	96,87
3	Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan	2.100.000.000	47,65	1.860.148.199	88,58
4	Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan	600.000.000	13,61	551.610.225	91,94
5	Laporan Kegiatan Pembinaan	1.010.310.000	22,92	921.602.450	91,22

	(Output Generik)				
	Total	4.407.310.000	100,00	3.994.746.174	90,64

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 78.911.318.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 73.155.041.555,- atau 92,71 persen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Alokasi Rp.	%	Realisasi Rp.	%	
1	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Diberdayakan	40.426.260.000	51,23	37.775.768.920	93,44	DK
2	Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG	19.719.250.000	24,99	18.816.382.250	95,42	TP
3	Laporan Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	9.128.550.000	11,57	7.890.723.210	86,44	DK
4	Laporan Kajian Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan	4.115.800.000	5,22	3.651.095.225	88,71	TP
5	Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik)	456.300.000	0,58	386.631.850	84,73	DK
	Total	78.911.318.000	100,00	73.155.041.555	92,71	

F. Hambatan dan Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan analisis yang akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan kegiatan prioritas.

2. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan kunjungan lapangan ke kelompok sasaran.
3. Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja daerah dan kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan: (a) jumlah KK miskin hasil DDRT tidak semua menjadi anggota kelompok afinitas, karena alokasi anggaran terbatas; (b) koordinasi provinsi dan kabupaten dalam DKP belum optimal; (c) pembinaan pendamping masih belum optimal; dan (d) kurangnya dukungan daerah dalam keterpaduan/sinergitas kegiatan untuk mempercepat pembangunan di lokasi demapan.
5. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG diantaranya yaitu:
 - a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan indikator SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia di setiap wilayah.
 - b) Terkait Tim Pokja SKPG dan koordinasinya: (a) beberapa provinsi dan kabupaten belum membentuk Tim SKPG; (b) efektifitas kerja Tim SKPG belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada proses analisis data dan pelaporan rutin oleh provinsi; (c) Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik; (d) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG sebagai sistem pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis; (e) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan SKPG, sehingga menghambat proses analisis SKPG, (f) aspek ketersediaan dan pemanfaatan untuk indikator SKPG masih terlalu tinggi persentase pengukurannya.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data NBM di daerah.

G. Upaya yang dilakukan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain : meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait penyediaan data dan informasi dan meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan, bahwa sebagian besar indikator kinerja kegiatan telah memberikan benefits, namun demikian impacts yang dihasilkan sebagian besar masih memerlukan waktu untuk klarifikasi.

Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selama tahun 2013 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan melalui 5 indikator berikut:

1. Jumlah desa yang diberdayakan Demapan (regular dan kawasan) di 1.625 desa dengan capaian di 1.625 desa atau 100 persen;
2. Analisis penanganan daerah/lokasi rawan pangan, SKPG di 455 lokasi dilaksanakan dengan capaian 455 lokasi atau 100 persen;
3. Jumlah hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Nasional, dengan capaian 1 laporan atau 100 persen;
4. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan 36 laporan mencapai 100 persen.
5. Jumlah laporan hasil penguatan kapasitas aparat dan masyarakat mencapai 8 laporan mencapai 100 persen.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.318.628.000,- dan telah terealisasi Rp. 77.149.787.729,- atau 92,60 persen, yang dialokasikan pada di 9 kegiatan yang meliputi : Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Akses Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dan SKPG, Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan, Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan, Peningkatan Kapasitas LKD Demapan, dan Apresiasi SKPG.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Perlunya peningkatan sosialisasi kegiatan Pusat ke daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
4. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah.

Lampiran 1

Tabel Lokasi dan Bansos Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2013

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	SP2D	Keterangan
1	Aceh	Kota Sabang	Sukakarya	100,000,000	Perbatasan
			Sukajaya	100,000,000	
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	200,000,000	Perbatasan
			Teluk Mengkudu	200,000,000	Perbatasan
3	Riau	Bengkalis	Bukit Batu	200,000,000	Perbatasan
			Bantan	200,000,000	Perbatasan
		Kep. Meranti	Rangsang Barat	200,000,000	Perbatasan
			Rangsang Pesisir	200,000,000	Perbatasan
		Indragiri Hilir	Gaung	200,000,000	Perbatasan
			Enok	200,000,000	Perbatasan
		Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	200,000,000	Perbatasan
			Sinaboi	200,000,000	Perbatasan
		Dumai	Sungai Sembilan	200,000,000	Perbatasan
			Dumai Barat	200,000,000	Perbatasan
4	Babel	Bangka Tengah	Koba	200,000,000	Kepulauan
		Belitung	Sijuk	200,000,000	Kepulauan
			Badau	200,000,000	Kepulauan
		Belitung Timur	Simpang Pesak	200,000,000	Kepulauan
			Damar	200,000,000	Kepulauan
5	Kepri	Anambas	Palmatak	200,000,000	Perbatasan
		Batam	Galang		Perbatasan

				200,000,000	
			Belakang padang	200,000,000	Perbatasan
		Bintan	Bintan Timur	200,000,000	Perbatasan
		Karimun	Tebing	200,000,000	Perbatasan
		Lingga	Singkep Pesisir	200,000,000	Kepulauan
		Natuna	Bunguran Barat	200,000,000	Kepulauan
			Bunguran Tengah	200,000,000	Kepulauan
6	Kalbar	Sanggau	Entikong	200,000,000	Perbatasan
			Sekayam	200,000,000	Perbatasan
		Kapuas Hulu	Embalon Hulu	200,000,000	Perbatasan
			Putussibau Utara	200,000,000	Perbatasan
		Sambas	Sajingan Besar	200,000,000	Perbatasan
			Galing	200,000,000	Perbatasan
		Sintang	Ketungau Hulu	200,000,000	Perbatasan
		Bengkayang	Jagoi Babang	200,000,000	Perbatasan
			Siding	200,000,000	Perbatasan
7	Kaltim	Kutai Barat	Long Hubung	200,000,000	Perbatasan
			Long Bagun	200,000,000	Perbatasan
		Nunukan	Sebatik	200,000,000	Perbatasan
			Lumbis	200,000,000	Perbatasan
		Malinau	Malinau Utara	200,000,000	Perbatasan
8	Sulut	Kepulauan Talaud	Beo	200,000,000	Perbatasan
			Lirung	200,000,000	Perbatasan
		Kepulauan Sangihe	Kendahe		Perbatasan

				200,000,000	
			Nusa Tabukan	200,000,000	Perbatasan
9	NTT	Kupang	Amfoang Utara	200,000,000	Perbatasan
			Amfoang Timur	200,000,000	Perbatasan
		Ende	Pulau Ende	200,000,000	Kepulauan
			Maukaro	200,000,000	Kepulauan
		TTU	Bikomi Nilulat	200,000,000	Perbatasan
			Bikomi Utara	200,000,000	Perbatasan
		Sumba Timur	Kuta	200,000,000	Kepulauan
			Haharu	200,000,000	Kepulauan
		Alor	Alor Selatan	200,000,000	Perbatasan
			Alor Timur	200,000,000	Perbatasan
		Rote Ndao	Rote Barat Daya	200,000,000	Perbatasan
			Rote Barat	200,000,000	Perbatasan
		Lembata	Atadai	200,000,000	Kepulauan
			Nubatukan	200,000,000	Kepulauan
		Sikka	Palue	200,000,000	Kepulauan
			Alok Timur	200,000,000	Kepulauan
		Belu	Kobalima Timur	200,000,000	Perbatasan
			Tasifeto Timur	200,000,000	Perbatasan
		Sumba Barat	Laboya Barat	200,000,000	Kepulauan
			Loli	200,000,000	Kepulauan
10	Maluku Utara	Pulau Morotai	Morotai Jaya	200,000,000	Perbatasan
			Morotai Timur		Perbatasan

				200,000,000	
11	Maluku	Kep. Aru	Aru Tengah Timur	100,000,000	Perbatasan
			Aru Selatan	100,000,000	
		Maluku Tenggara Barat	Selaru	200,000,000	Perbatasan
			Nirunmas	200,000,000	Perbatasan
		Maluku Tenggara	Kei Besar	200,000,000	Kepulauan
			Kei kecil	200,000,000	Kepulauan
		Maluku Barat daya	Letti	200,000,000	Perbatasan
		Kota Tual	Tayando Tam	200,000,000	Kepulauan
			Kur	200,000,000	Kepulauan
12	Papua Barat	Maybrat	Distrik Aitinyo	200,000,000	Papua Barat
			Aifat Utara	200,000,000	Papua Barat
		Tambrau	Senopi	200,000,000	Papua Barat
			Kabar	200,000,000	Papua Barat
		Manokwari	Manokwari Utara	200,000,000	Papua Barat
		Raja Ampat	Waigeo Selatan	200,000,000	Perbatasan
			Meos Mansar	200,000,000	Perbatasan
		Fak-fak	Fak-fak Barat	200,000,000	Papua Barat
			Karas	200,000,000	Papua Barat
13	Papua	Jayapura	Kaureh	200,000,000	Papua
			Yapsi	200,000,000	Papua
		Jayawijaya	Asolokobal	200,000,000	Papua
			Piramid	200,000,000	Papua
		Biak Numfor	Andey		Papua

				200,000,000	
			Biak Timur	200,000,000	Papua
		Kepulauan Yapen	Kosiwo	200,000,000	Papua
			Angkaisera	200,000,000	Papua
		Kota Jayapura	Muara Tami	200,000,000	Papua
			Abepura	200,000,000	Papua
		Bovendigoel	Waropko	200,000,000	Perbatasan
			Mindiptana	200,000,000	Perbatasan
		Supiori	Supiori Selatan	200,000,000	Perbatasan
			Kepulauan Aruri	200,000,000	Perbatasan
		Nabire	Makimi	200,000,000	Papua
			Napan	200,000,000	Papua
		Mimika	Agimuga	200,000,000	Papua
			Mimika Baru	200,000,000	Papua
		Keerom	Arso Timur	200,000,000	Perbatasan
			Waris	200,000,000	Perbatasan
		Pegunungan Bintang	Oksibil	200,000,000	Perbatasan
			Serambakon	200,000,000	Perbatasan
		Waropen	Oudate	200,000,000	Papua
			Wapoga	200,000,000	Papua
		Merauke	Sota	200,000,000	Perbatasan
			Noukenjerai	200,000,000	Perbatasan
	13 Prop	60 Kab	109 Kawasan	21,800,000,000	

Lampiran 2

Tabel Indikator, Definisi, Perhitungan dan Sumber Data FSVA Nasional 2013

Indikator	Definisi dan Perhitungan	Sumber Data
Rasio konsumsi per kapita normative terhadap ketersediaan bersih "beras + tepung terigu + ubi jalar + ubi kayu"	1. Data rata-rata produksi bersih tiga tahun (2009-2011) padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar pada tingkat kabupaten dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar. Untuk rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (faktor konversi sereal) untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan sereal. Kemudian dihitung total produksi sereal yang layak dikonsumsi.	Provinsi dalam Angka, BPS atau Dinas/Kantor Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten (data tahun 2009-2011)

	<p>2. Ketersediaan bersih sereal per kapita per hari dihitung dengan membagi total ketersediaan sereal kabupaten dengan jumlah populasinya (data penduduk pertengahan tahun, 2010).</p> <p>3. Data bersih sereal dari perdagangan dan impor tidak diperhitungkan karena data tidak tersedia pada tingkat kabupaten.</p> <p>4. Konsumsi normatif sereal/hari/kapita adalah 300 gram/orang/hari.</p> <p>5. Kemudian didapatkan rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih sereal per kapita. Rasio lebih besar dari 1 menunjukkan daerah defisit pangan dan daerah dengan rasio lebih kecil dari 1 adalah surplus untuk produksi sereal.</p>	
AKSES PANGAN		
Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan	Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Garis kemiskinan nasional sebesar US \$1,25 (Purchasing Power Parity - PPP) per orang per hari.	Data dan informasi tentang kemiskinan, BPS 2012, Buku 2: Kabupaten/Kota
Persentase desa dengan akses penghubung yang kurang memadai	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau sarana transportasi air.	PODES (Survei Potensi Desa) 2011, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2011, BPS
PEMANFAATAN PANGAN		

Perempuan Buta Huruf	Persentase perempuan di atas 15 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis huruf latin.	SUSENAS 2011, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.	SUSENAS 2011, BPS
Persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan	Persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu, dll).	PODES 2011, BPS
GIZI DAN DAMPAK KESEHATAN		
Tinggi badan balita di bawah standar (stunting)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	RISKESDAS 2013, Kementerian Kesehatan
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.	SUSENAS 2011, BPS
KERENTANAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN SEMENTARA		
Bencana alam	Bencana alam yang terjadi di Indonesia selama tahun 2000-2013 dan perkiraan kerusakan yang terjadi.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2000-2013
Deviasi curah hujan	Curah Hujan Tahun 2012 dibandingkan dengan rata-rata curah hujan 50 tahun (1950-2000)	NASA-WorldClim, 2013

Persentase daerah puso	Persentase luas sawah yang rusak akibat kekeringan, banjir dan OPT untuk komoditas padi dan jagung (2010-2012)	Kementerian Pertanian, 2012
Deforestasi	Deforestasi adalah perubahan tutupan lahan dari jenis hutan ke jenis non-hutan. Laju deforestasi berdasarkan analisis citra satelit Landsat selama periode 2009 – 2011.	Perhitungan deforestasi di Indonesia 2012, Kementerian Kehutanan

Lampiran 3

Tabel Kabupaten/kota yang masuk dalam prioritas 1 – 3 (akses pangan sangat rendah s/d akses pangan cukup rendah) berdasarkan indeks komposit/gabungan

Provinsi	Kabupaten	komposit	Prioritas	Ranking	Peringkat
Papua	Dogiyai	0.85	1	483	1
Papua	Mamberamo Tengah	0.82	1	480	2
Maluku	Maluku Barat Daya	0.81	1	445	3
Papua	Puncak	0.78	2	482	4
Papua	Deiyai	0.76	2	485	5
Papua	Mamberamo Raya	0.75	2	477	6
Maluku	Buru Selatan	0.72	2	446	7
Papua	Yalimo	0.71	2	481	8
Papua	Lanny Jaya	0.69	2	479	9
Papua	Yahukimo	0.68	2	470	10
Papua	Paniai	0.68	2	464	11
Aceh	Kota Subulussalam	0.68	2	23	12
Papua	Puncak Jaya	0.67	2	465	13
Papua	Tolikara	0.66	2	472	14
Papua	Pegunungan Bintang	0.65	2	471	15
Riau	Kepulauan Meranti	0.65	2	85	16
Papua Barat	Tambrauw	0.61	3	495	17
Sumatera Utara	Gunung sitoli	0.60	3	56	18
Maluku Utara	Pulau Marotai	0.59	3	455	19
Papua	Mappi	0.59	3	468	20
Papua	Asmat	0.59	3	469	21
Papua	Intan Jaya	0.57	3	484	22
Papua Barat	Maybrat	0.57	3	496	23
Papua	Supiori	0.57	3	476	24

Provinsi	Kabupaten	komposit	Prioritas	Ranking	Peringkat
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	0.54	3	286	25
Papua Barat	Teluk Bintuni	0.54	3	490	26
Papua Barat	Raja Ampat	0.53	3	494	27
Papua Barat	Kaimana	0.53	3	488	28
Jawa Timur	Sampang	0.53	3	250	29
Papua	Yapen Waropen	0.53	3	462	30
Papua	Boven Digoel	0.52	3	467	31
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	0.52	3	304	32
Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	0.52	3	113	33
Jawa Timur	Bangkalan	0.51	3	249	34
Papua	Mimika	0.51	3	466	35
Papua	Nduga	0.51	3	478	36
Maluku	Kepulauan Aru	0.51	3	442	37
Papua	Jayawijaya	0.50	3	459	38
Maluku	Kota Tual	0.50	3	448	39
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	0.49	3	57	40
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	0.49	3	305	41
Papua Barat	Sorong	0.49	3	493	42
Gorontalo	Kota Gorontalo	0.49	3	432	43
Sumatera Barat	Pasaman Barat	0.49	3	68	44
Gorontalo	Boalemo	0.49	3	427	45
Nusa Tenggara Timur	Ende	0.49	3	299	46
Maluku	Seram Bagian Timur	0.49	3	444	47
Papua	Waropen	0.48	3	475	48
Sulawesi Barat	Mamasa	0.48	3	435	49
Sumatera Barat	Kota Pariaman	0.48	3	75	50
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	0.48	3	280	51
Aceh	Pidie	0.48	3	9	52
Sulawesi Selatan	Sinjai	0.48	3	397	53